

DAFTAR PUSTAKA

LITERATUR:

- M. Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (penyidikan dan penuntutan) edisi kedua*, Jakarta: Sinar Grafik.
- Iman Budhi Santosa, 2001, *kisah Polah Tingkah: Potret Gaya Hidup Transformatif*, Yogyakarta: Lkis
- Sukardi, 2005 *Illegal Logging dalam Perspektif Politik Hukum Pidana (Kasus Papua)*, Yogyakarta: Andi Offset
- Wisnubroto Ali, 2002. *Praktek Peradilan Pidana (Proses Persidangan Perkara Pidana)*, Jakarta : PT. Galaxy Puspa Mega.
- AR. Sujono & Boni Daniel, 2013 *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Hamzah Andi, 2006, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Revisi*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- W. Bawangan Gerson, 1997, *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*, Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Muladi, Dan Barda Nawawi Arif, 1992, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Lumni Kencana Inu. 2002, *Sistem Pemerintah Indonesia*. Jatinangor: Sekolah Tinggi Dalam Negeri.
- Soekanto Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum.cet3*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Soekanto Soerjono, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Cetakan Kelima. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Supramono, G. 2001. *Hukum Narkotika Indonesia*, Jakarta: Djembatan.
- Soejodono, D. 1987, *Hukum Narkotika Indonesia*, Bandung: Alumni
- Dellyana, Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Moekijat, *Koordinasi suatu Tinjauan Teoritis*, 1994, Bandung: Mandar Maju,
- L Todung Mulya, 2009, *Kontroversi Hukuman Mati, Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*, Jakarta: Kompas Media Nusantara
- Nawawi Barda Arief, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Mahmud Peter Marjuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group.

- Inu Kencana. 2002, *Sistem Pemerintah Indonesia*. Sekolah Tinggi Dalam Negeri Jatinangor
- Sukardi, 2005 , *Illegal Logging dalam Perspektif Politik Hukum Pidana (Kasus Papua)*, Yogyakarta :Andi Offset
- Tossi dan Carol dalam Maroni, 1996, *Koordinasi Penegak Hukum dalam Rangka Pelaksanaan dan Pengawasan Penahanan Pada Proses Penyidikan Perkara Pidana*, Semarang: Tesis Progam Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
- Wicaksono Ridho, *Penyidikan Badan Narkotika Nasional Dalam Perkara Narkotika*, Skripsi: Universitas Airlangga.
- Fransisca Avianti, 2008, *Kebijakan PerUndang-undangan Mengenai Badan Penyidik dalam Sistem peradilan Pidana Terpadu di Indonesia*, Semarang:Tesis Progam Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP
-, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
-, Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional.
-, Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 Tengan Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotia Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota.
-, Peraturan Bersama No 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi

SUMBER LAIN:

- <http://e-journal.uajy.ac.id/4932/2/1HK10212.pdf> di akses 10 Maret 2017
- <http://www.bnn.go.id/read/page/8007/tujuan-pokok-dan-fungsi> diakses tanggal 10 Maret 2017
- <http://tulisanterkini.com/artikel/artikel-ilmiah/8979-langkah-langkah-penyidik-dalam-penyelesaian-tindak-pidana-narkoba.html> diakes pada tanggal 23 September 2017